

Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dalam Pemilihan Umum

Dinda Chairani^{a, 1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ dindachairani@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 6 Agustus 2022;
Revised: 15 Agustus 2022;
Accepted: 23 Agustus 2022.

Kata kunci:

Masyarakat Adat Baduy;
Partisipasi Politik;
Pemilu Representasi Politik.

Keywords:

Indigenous Baduy
Community;
Political Participation;
Political Representation
Election.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dalam Pemilihan Umum. Kajian ini penting karena partisipasi politik masyarakat Baduy terikat erat dengan struktur politik tradisional mereka. Sementara itu, keterwakilan politik masyarakat adat sangat penting di tengah krisis representasi di lembaga politik formal melalui kontestasi elektoral. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Kontestasi pemilu tidak berdampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat Baduy. Penduduk Baduy tidak direpresentasikan oleh partai maupun kandidat di parlemen baik secara simbolik maupun substantif. Partisipasi politik masyarakat adat Suku Baduy dalam pemilu legislatif tidak memiliki implikasi terhadap representasi politik. Kepentingan masyarakat adat Suku Baduy tidak terakomodasi oleh representasi formal melalui pintu pemilihan baik oleh partai maupun calon kandidat. Partisipasi politik dalam pemilu seringkali dipandang hanya berkaitan dengan teknis penyelenggaraan kepemiluan. Kandidat mengunjungi masyarakat suku baduy untuk mencoba merebut simpati pemilih. Setelah pemilu usai, partai atau kandidat menghilang tanpa jejak. Demokrasi representatif, partai atau anggota legislatif dituntut untuk menjalankan ide representasi yang mengedepankan kepentingan konstituen.

ABSTRACT

Baduy Indigenous People's Political Participation in General Election. *This article discusses the Political Participation of the Baduy Indigenous People in General Elections. This study is important because the political participation of the Baduy people is closely tied to their traditional political structure. Meanwhile, the political representation of indigenous peoples is very important in the midst of a crisis of representation in formal political institutions through electoral contestation. This article uses a type of library research. Election contestation does not have a significant impact on the interests of the Baduy people. The Baduy population is not represented by any party or candidate in parliament either symbolically or substantively. the political participation of the Baduy indigenous people in legislative elections has no implications for political representation. The interests of the indigenous people of the Baduy tribe are not accommodated by formal representation through the election door, either by parties or by prospective candidates. Political participation in elections is often seen as only related to the technical implementation of elections. Candidates visit the Baduy community to try to win the sympathy of voters. After the election is over, the party or candidate disappears without a trace. Representative democracy, parties or members of the legislature are required to carry out the idea of representation that prioritizes the interests of the constituents.*

Copyright © 2022 (Dinda Chairani). All Right Reserved

How to Cite : Chairani, D. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dalam Pemilihan Umum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 322–327.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1675>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam demokrasi elektoral, partisipasi politik dalam pemilu menjadi penting sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar tingkat legitimasi warga negara terhadap pemerintahan yang terpilih melalui kontestasi elektoral (Andiraharja, 2020). Asumsinya, semakin tinggi tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu, maka partai atau kandidat dianggap legitimate (Heywood, 2014).

Diskursus tentang partisipasi politik dalam pemilu pada masyarakat adat Suku Baduy dipilih karena beberapa pertimbangan. Pertama, masyarakat adat Baduy merupakan masyarakat minoritas di Kabupaten Lebak, Banten. Secara kuantitas, jumlah penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2017 sebanyak 1.288.103 jiwa, sementara suku Baduy yang terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar hanya sekitar 11.699 jiwa (Lebakkab.bps.go.id, 2018). Artinya, eksistensi populasi masyarakat Suku Baduy hanya 0,9 % dari seluruh jumlah populasi penduduk di Kabupaten Lebak, Banten. Selain itu, mereka memiliki cara pandang yang berbeda dengan masyarakat umumnya dalam berpolitik dan menjalani kehidupan sehari-hari yang masih kental dengan unsur adat. Seperti memilih untuk mengasingkan diri dari perkembangan dunia luar dan menetap hidup di kawasan pedalaman hutan.

Kedua, partisipasi politik masyarakat adat Baduy tidak bisa lepas dari pengaruh struktur adat yang mengatur cara mereka berpolitik praktis (Kurnia, Sihabudin, & Yustianti, 2010). Ketiga, dalam setiap perhelatan kontestasi elektoral, partisipasi memilih masyarakat adat Baduy cenderung sangat rendah. Keempat, sebagai konsekuensi dari tiga poin tersebut menyebabkan ide representasi yang dijalankan oleh partai atau kandidat atas nama kepentingan masyarakat adat Baduy mengalami hambatan sehingga upaya untuk membangun political linkage antara masyarakat Baduy dan struktur politik formal (partai atau pemerintah) menjadi sulit, terutama di masa pandemi (Anggraeni et al., 2020; Gultom, & Saragih, 2021).

Hal ini karena struktur adat mempengaruhi bagaimana masyarakat memainkan politik dan membuat pilihan tentang partai dan kandidat tertentu. Terdapat beberapa kajian yang membahas tentang partisipasi politik masyarakat adat Baduy dalam demokrasi elektoral. Namun dari kajian yang ada lebih banyak menempatkan partisipasi politik masyarakat adat Baduy dari sudut pandang kultural. Hal ini karena struktur adat mempengaruhi bagaimana masyarakat memainkan politik dan membuat pilihan tentang partai dan kandidat tertentu. Keberadaan lembaga adat yang dikepalai oleh seorang Puun dan Jaro Pamarentah sangat strategis dalam mengatur masyarakat adat agar tetap menjalankan aturan adat, termasuk ketika perhelatan pemilu dilaksanakan (Dahlan, 2019; Karman, 2014; Moenawar, Priatna, & Santoso, 2019).

Kajian lainnya memotret aturan adat yang secara spesifik mengatur bagaimana pemilu seharusnya dijalankan yang berdampak pada tinggi dan rendahnya partisipasi politik masyarakat adat Baduy untuk datang ke TPS. Misalnya, adanya larangan bagi partai politik atau kandidat untuk melakukan kampanye secara terbuka dan memasang alat peraga kampanye karena dianggap akan menciptakan perpecahan politik di tengah masyarakat. Bentuk Kampanye yang dibolehkan adalah kampanye secara personal dengan mengunjungi tiap-tiap rumah warga (silaturahmi politik) (Kurnia et al., 2010; Sofandi, 2014). Dalam tulisan ini, partisipasi politik yang dimaksud adalah partisipasi dalam pemilu, yaitu kegiatan politik warga negara dalam memberikan suara untuk memilih calon atau partai di tempat pemungutan suara (Norris, 2004).

Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan berbagai literatur, buku, majalah, catatan dan referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Artikel ini

menggunakan data sekunder dan dokumentasi yang merujuk pada bahan bacaan yang relevan terkait dengan partisipasi politik masyarakat adat baduy dalam pemilihan umum. Sumber informasi dari media online juga dijadikan sebagai referensi pada tulisan ini. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat adat Baduy tinggal di lereng gunung Kendeng yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka memilih untuk hidup mengasingkan diri dari interaksi dengan masyarakat lain. Hidup harmonis dengan alam dengan menjunjung tinggi aturan adat menjadi identitas mencolok yang membedakan mereka dengan masyarakat non Baduy. Suku Baduy adalah penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang percaya pada roh nenek moyang. Suku Baduy pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu Baduy

Dalam dan Baduy Luar. Baduy Luar cenderung lebih dinamis dan terbuka terhadap interaksi dengan masyarakat luar. Warga Baduy tidak mengenyam pendidikan secara formal. Karena itu tingkat literasi masih sangat rendah. Mereka belum mampu membaca. Bahkan pegawai di Desa Kanekes tidak bisa baca tulis. Implikasinya, sulit menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat Baduy terkait program yang digagas oleh pemerintah (Kurnia et al., 2010).

Dalam berpolitik, keberadaan struktur adat sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga Baduy. Mereka dipimpin oleh seorang Puun yang sangat disegani karena dianggap merepresentasikan hukum adat dan kebaikan alam. Puun dibantu oleh Jaro atau Kepala Desa yang dipilih berdasarkan tata cara adat, yaitu berdasarkan hasil musyawarah Puun. Kepemimpinan Jaro tidak dibatasi, Jaro memiliki peran ganda. Di satu sisi, Jaro bagian dari lembaga adat dibawah Puun yang bertanggung jawab mempertahankan tradisi dan hukum adat yang sudah mengakar kuat pada masyarakat Baduy. Di sisi lain, Jaro adalah jabatan seorang kepala desa dimana dalam struktur pemerintahan formal berada di bawah pemerintahan di atasnya yaitu kecamatan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Anggraeni et al., 2020).

Salah satu bentuk pengaruh struktur adat terhadap cara masyarakat Baduy berpolitik adalah adanya nilai adat berupa Lunang atau Milu Kanu Meunang (ikut pada yang menang) yaitu sikap menerima dan taat kepada aturan pemerintah terlepas siapapun calon kandidat atau partai yang memenangkan kontestasi elektoral. Meskipun struktur adat sangat berperan dalam mengkonstruksi cara berpolitik masyarakat adat Baduy, tetapi mereka diberikan kebebasan hak politik untuk memilih calon kandidat atau partai. Tidak ada larangan, paksaan atau sanksi dari lembaga adat bagi masyarakat baduy yang memutuskan untuk datang atau tidak datang ke TPS. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi masyarakat adat pada umumnya, dimana pilihan politik kerap dimobilisasi dan mengikuti pemilihan ketua adat (Karman, 2014).

Kendati demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pemilu. Misalnya, terdapat larangan kampanye terbuka dan pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Baduy karena dianggap akan menimbulkan gesekan politik antara masyarakat Baduy. Partai atau kandidat yang ingin berkampanye diarahkan untuk berkunjung ke rumah warga secara personal. Selain aturan kampanye, ketika jadwal pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU setempat berbarengan dengan hari perayaan adat, maka masyarakat adat lebih memilih untuk mengikuti perayaan adat dibanding datang ke TPS. Hal ini pernah terjadi pada pemilu 2014 sehingga partisipasi masyarakat Baduy yang datang ke TPS sangat rendah (Saputra, 2017).

Upaya Membaca Partisipasi Politik Masyarakat Suku Baduy. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat Baduy memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Meskipun peluang politik untuk dipilih dalam pemilu terbuka lebar, namun sampai saat ini belum ada calon kandidat yang berasal dari

suku asli Baduy mengikuti kontestasi elektoral. Kendati demikian, mereka memiliki hak politik untuk memilih partai atau calon kandidat sesuai dengan kehendak mereka (Prasetyo, 2022). Partisipasi politik dalam pemilu dapat dilacak pada pemilu tahun 1973 saat Orde Baru Soeharto berkuasa. Tingkat partisipasi masyarakat Baduy pada pemilu 1973 sangat rendah karena terkendala logistik dan jarak TPS yang jauh dari pemukiman yang tersebar di wilayah perbukitan dan hutan menyebabkan mereka kesulitan untuk datang ke TPS (Dahlan, 2019). Partai Golkar tampil sebagai pemenang di wilayah Baduy. Hal ini tidak lepas karena anggapan bahwa Golkar adalah partai pemerintah. Sementara, warga Baduy sangat memegang prinsip mengikuti dan taat terhadap pemerintah.

Tumbangnya Rezim Soeharto pada tahun 1998 telah menggeser sistem politik dari otoriter ke arah yang lebih demokratis. Banyak perubahan politik terjadi. Sistem kepartaian menjadi multi-partai dengan jumlah partai yang lebih bervariasi tanpa bayangan hegemoni partai Golkar. Selain itu, penyelenggaraan pemilu jauh lebih demokratis. Struktur peluang politik yang terbuka turut membentuk bagaimana masyarakat adat Baduy berpolitik khususnya terkait partisipasi politik dalam pemilu.

Implikasi terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. Partisipasi politik masyarakat Baduy dalam pemilu legislatif pada dasarnya merupakan bentuk mengekspresikan pilihan politiknya. Meski tingkat partisipasi cenderung rendah karena berbagai faktor teknis dan kultural, tetapi terjadi trend peningkatan jumlah partisipasi. Selain absennya representasi formal-simbolik di parlemen, representasi substantif yang menitikberatkan pada isu dan agenda kebijakan tertentu yang dijalankan oleh kandidat maupun partai politik khususnya di daerah pemilihan Baduy juga belum nampak. Padahal, masyarakat Baduy membutuhkan kepastian hukum terkait pengakuan dan jaminan negara bahwa eksistensi mereka tidak terancam oleh kepentingan ekonomi politik dari pihak tertentu. Di tahun 2019, masyarakat Baduy melalui Jaro (kepala desa adat Baduy) mendesak pemerintah merealisasikan undang-undang tentang Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat sempat menjadi Prolegnas DPR RI pada tahun 2013 namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal, eksistensi masyarakat adat terus terancam khususnya terkait dengan kepemilikan tanah adat yang berpotensi memunculkan konflik agraria baik antara masyarakat adat dengan pihak swasta maupun negara. Di tataran daerah, berdasarkan keterangan Jaro, realisasi Perda Perlindungan Desa Adat masih alot (Satubanten.com, 2019). Berbeda dengan pemerintah daerah Provinsi Bali yang berinisiatif membentuk Perda Perlindungan Desa Adat ditengah ketidakpastian penerapan Undang-undang di tingkat nasional. Perda Perlindungan Masyarakat Adat Bali yang ditetapkan pada tahun 2019 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham.

Pada dasarnya, pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah mengeluarkan Perda No 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Namun, tokoh masyarakat Baduy merasa bahwa Perda tersebut masih lemah dan belum cukup dalam melindungi eksistensi masyarakat Baduy. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pedoman pelaksanaan teknis untuk mengimplementasikan Perda tersebut. Selain itu, Perda tersebut dinilai sudah usang dan butuh pembaharuan karena permasalahan adat di masa depan kian kompleks. Segenap tokoh Baduy mendesak agar dibentuk Perda Gubernur Banten dan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat (Muhlisin, Ulumi, & Humaeni, 2017).

Kekosongan representasi formal melalui electoral pada akhirnya membuka peluang hadirnya aktor informal yang mengklaim berdiri atas nama kepentingan masyarakat Suku Baduy. Mereka adalah tokoh adat (Puun dan Jaro) yang memiliki concern memperjuangkan regulasi perlindungan masyarakat adat ke pemerintah meski sampai saat ini belum menemukan titik terang. Hal ini pula yang menyebabkan sebagian warga Baduy memandang bahwa pemilu tidak memberikan pengaruh yang signifikan (Kurnia et al., 2010; Wadu, 2016). Partisipasi politik dalam pemilu hanya sebatas bentuk ketaatan mereka terhadap negara terkait ajakan untuk memilih karena mereka memegang teguh prinsip adat berupa Lunang-taat terhadap pemerintah.

Simpulan

Absennya representasi politik di parlemen baik secara simbolik (*stand for*) maupun substantif (*act for*) yang mengatasnamakan kepentingan hajat hidup masyarakat adat Baduy menjadi alasan mengapa produk kebijakan menyangkut perlindungan adat menemui jalan buntu. Hal ini juga mempertegas argumen bahwa partisipasi politik masyarakat adat Suku Baduy dalam pemilu legislatif tidak memiliki implikasi terhadap representasi politik. Kepentingan masyarakat adat Suku Baduy tidak terakomodasi oleh representasi formal melalui pintu pemilihan baik oleh partai maupun calon kandidat. Partisipasi politik dalam pemilu seringkali dipandang hanya berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilihan. Kandidat hanya mengunjungi masyarakat suku baduy untuk mencoba merebut simpati pemilih. Setelah pemilu usai, partai atau kandidat menghilang tanpa jejak. Padahal, dalam demokrasi representatif, partai atau anggota legislatif dituntut untuk menjalankan ide representasi yang mengedepankan kepentingan konstituen mereka. Political will dari partai sebagai institusi politik yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dan menjalankan artikulasi kepentingan menjadi sangat penting. Jika partai menganggap suku Baduy hanya sebagai objek partisipasi dalam pemilu, maka dapat dipastikan representasi material mengenai adanya kebijakan akomodatif bagi masyarakat Adat Baduy hanyalah rekayasa.

Referensi

- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31.
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense. 418(Acec 2019), 428–431. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Dahlan, A. B. (2019). Orang Baduy Dalam Lintasan Politik Indonesia. *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(1), 1–10.
- Fudzni, E. H., & Aulia, S. S. (2021). Penguatan Literasi Digital Untuk Mendukung Hak Warga Negara di Media Sosial Melalui Pembelajaran PPKn. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 1-10.
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta, 19.
- Gultom, Andri, "Mencurigai Mitos Timur dan Barat," Researchgate, 2022<https://www.researchgate.net/publication/364194071_Mencurigai_Mitos_Timur_dan_Barat>
- Gultom, Andri, "Menengok Indonesia Merdeka dari Pintu Belakang," Researchgate, 2022<https://www.researchgate.net/publication/362758687_Menengok_Indonesia_Merdeka_dari_Pintu_Belakang>
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Karman, K. (2014). Dialectic of Baduy Community in Meaning Reality of General Election 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2).
- Larasati, A. (2021). Pengaruh Gerakan Literasi Sekolah dan Minat Baca Terhadap Keterampilan Berkomunikasi Siswa. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 27-31.
- Moenawar, M. G., Priatna, W. B., & Santoso, H. (2019). Consciousness Raising Dan Partisipasi Politik Suku Baduy Di Era Digital (Tinjauan Awal). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 69–80.
- Ningari, W. F. (2022). Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Metode Pembelajaran Contextstual And Learning. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 31-37.
- Prasetyo, A. (2022). Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter Peserta Didik melalui Pembelajaran Berbasis Masalah di Sekolah Menengah Pertama. *Pelita: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(1), 1-10.
- Puspitasari, Q. D., & Wibowo, A. (2021). Peran guru dalam mengembangkan kreativitas siswa kelas IV di SD Negeri Plebengan Bambanglipuro. *Pelita: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 1(1), 1-7.

- Putri, A. K., & Setiadi, H. W. (2021). Pengembangan Media Flash Card Berbantuan Metode Silaba Pada Kemampuan Membaca Siswa. *Pelita: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 1(1), 15-19.
- Ramadhan, M. F., & Husen, A. (2021). Pengembangan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik di SMA Negeri 43 Jakarta. *Pelita: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 1(1), 26-31.
- Rifki, A. W. (2022). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Di Sekolah. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 46-51.
- Saputra, F. T. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Baduy Dalam Pemilihan Umum-(Studi Fenomenologi Partisipasi Politik Masyarakat Baduy Pada Pemilu 2014). *Prosiding Magister Ilmu Komunikasi*, 1(1).
- Sofandi, D. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Suku Baduy Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Banten Periode 2012-2017. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).